

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2026

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1.	Profil Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris Dinas	2026	Softcopy	Selama masih Berlaku
2.	Ringkasan Informasi tentang Kinerja	LKJIP, Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan, dan IKU (Indikator Kinerja Utama)	Perencana	Sekretaris Dinas	2026	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
3.	Pembayaran Jatuh Tempo PBB	Pembayaran Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya Tgl 31 Agustus	Kepala Bidang PBB & BPHTB	Bidang PBB & BPHTB	Sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak	Cetak dan Digital	Selama Masih Berlaku

		(Tahun berjalan)			Bumi dan Bangunan (PBB)		
4.	Pengumuman Cetak Masal dan Cetak Mandiri SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) melalui E-SPPT	Pengumuman Informasi Cetak Masal dan Cetak Mandiri SPPT PBB melalui E-SPPT	Kepala Bidang PBB & BPHTB	Bidang PBB & BPHTB	Sejak di terbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB	Digital	Selama Masih Berlaku
5.	Ringkasan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran	Menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca sebagai dasar pemenuhan data atas permintaan data untuk BPS, GFS, DAU SG, SISMON TEPR, KEMENDAGRI	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2025	Softcopy	Selama Masih Berlaku
6.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited	Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan yang disajikan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala BPPKAD	2026	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

		berdasarkan transparansi dan akuntabilitas.					
7.	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan dalam periode satu tahun anggaran.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2026	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
8.	Berita Acara Rekonsiliasi Akuntansi	Berita Acara yang dibuat setelah melakukan rekonsiliasi antara aplikasi SIMRAL, SIPD serta bukti-bukti transaksi yang diperlukan. Berita Acara ini menjadi salah satu persyaratan dalam pencairan TPP.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Sub bidang Pendapatan dan Belanja	2026	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
9.	SOP Penyusunan LKPD	SOP Penyusunan LKPD	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

10.	SOP Pengelolaan Persediaan	SOP Pengelolaan Persediaan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
11.	SOP Rekonsiliasi Aset Tetap	SOP Rekonsiliasi Aset Tetap	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
12.	SOP Rekonsiliasi Kas	SOP Rekonsiliasi Kas	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
13.	SOP Rekonsiliasi LRA LO	SOP Rekonsiliasi LRA LO	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
14.	SOP Penyusunan LPP APBD	SOP Penyusunan LPP APBD	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
15.	SOP Penyusunan Informasi Keuangan Daerah-Syarat Salur Dana Transfer Umum	SOP Penyusunan Informasi Keuangan Daerah-Syarat Salur Dana Transfer Umum	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO.	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Pemberitahuan Penundaan Jatuh Tempo PBB dan Penghapusan Denda PBB	Pemberitahuan Penundaan Jatuh Tempo PBB dan Penghapusan Denda PBB	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Kepala Bidang PBB & BPHTB - BPPKAD	Pada moment tertentu, misal Hari Jadi Kota Probolinggo	Digital	Selama masih berlaku

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	Judul Informasi	Ringkasan Isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPPKAD	Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja	Perencana	Sekretaris Badan	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
2.	Pelayanan Informasi Publik	Informasi terkait Standar Pelayanan Publik	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris Badan	2020	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku
3.	Form Pelayanan PBB dan BPHTB	Form Pelayanan mutasi, dan lain-lain	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Kepala Bidang PBB & BPHTB	2025	Cetak	Selama masih berlaku
4.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kota.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
5.	Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-	Kepala Bidang Akuntansi dan	Kepala Bidang Akuntansi dan	2024	Softcopy dan	Selama Masih

		aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam Kebijakan Akuntansi berbasis akrual	Pelaporan	Pelaporan		Hardcopy	Berlaku
--	--	---	-----------	-----------	--	----------	---------

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Data Kepegawaian	UU No. 14 pasal 6 ayat 3.c dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan Hak hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan Hak hak pribadi	Tidak terbatas
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
3.	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang belum disetujui oleh DPRD dan Walikota yang kemudian dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
4.	Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) dan draft Rencana Kerja Pemerintah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP IP	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai mendapat penetapan dari Walikota

	(RKP) sebelum disahkan.				
5.	<i>Exercise</i> /perhitungan APBD Pemerintah Daerah (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD).	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan dalam Perda
6.	Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak- pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Selama masih berlaku
7.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
8.	Data BMN/BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)	a. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum
9.	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	a. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. UU No. 15 Tahun 2004	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas

		tentang Perbendaharaan Negara d. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara			
10.	Database objek pajak dan retribusi	a. Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE b. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
11.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
12.	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah	a. Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas
13.	Database Barang Milik Daerah	a. Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas
14.	LHP (laporan Hasil Pemeriksaan) dan LHR (Laporan Hasil Reviu)	Pasal 44 ayat (1) huruf g, h, i dan ayat (2) jo Pasal 85 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Probolinggo



Pujo Agung Satrio, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197809271998021001